

REFORMASI SEKOLAH DAN BK KOMPREHENSIF DALAM TINJAUAN HISTORIS; Kontradiktoris ataukah Komplementaris?

Oleh Fathur Rahman

PENGANTAR

Diskursus tentang model Bimbingan dan Konseling Komprehensif (selanjutnya disebut BKK) selama kurang lebih satu dekade terakhir telah menjadi tanda tanya besar tidak hanya di kalangan praktisi layanan BK di sekolah, tetapi juga seolah diragukan oleh beberapa kalangan akademisi BK. Gelombang besar BKK yang diwacanakan oleh organisasi profesi ABKIN dan “madzhab Bandung-Yogya” tersebut setidaknya-tidaknyanya telah menimbulkan gesekan dan tarik-menarik yang cukup kuat di kalangan elit organisasi profesi (bahkan melibatkan elit birokrasi di pemerintahan) dalam kaitannya dengan kebijakan praktis yang akan diberlakukan di institusi pendidikan (sekolah). Tanpa dapat dibendung, wacana BKK tersebut terus menggelinding jauh walaupun dengan “dukungan setengah hati” dari birokrat pendidikan. Harus diakui bahwa pada akhirnya dinamika perkembangan profesi bimbingan dan konseling lebih banyak diwarnai interupsi dan intervensi oleh pihak-pihak yang berpikir sempit dan pragmatis.

Walaupun minim dukungan dari birokrat pendidikan, inisiatif pengembangan model layanan BKK perlu kita lihat dari perspektif akademis yang bebas kepentingan dan bebas nilai. Kerisauan sebagian besar guru BK tentang sejauhmana model BKK ini telah diadopsi dan diakomodasi sebagai pola layanan resmi yang akan dikembangkan di sekolah oleh pemerintahan di tingkat lokal seharusnya tidak perlu muncul secara berlebihan, karena pada dasarnya organisasi profesi memiliki independensi akademik untuk mengembangkan “*body of knowledge*”-nya masing-masing tanpa harus terpasung oleh ada atau tidak ada dukungan dari birokrat.

Dalam paper ringkas ini, penulis ingin mengajak seluruh peserta mengalihkan perhatian sejenak pada latar historis lahirnya BKK. Kesadaran historis ini merupakan prasyarat mutlak bagi kalangan akademisi maupun praktisi bimbingan dan konseling untuk menentukan pilihan; apakah memilih BKK sebagai suatu keharusan sejarah ataukah sekedar “ikut” *trend* yang sedang berkembang. Di bagian akhir paper ini, penulis mendeskripsikan kerangka konseptual tentang BKK sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kesadaran sejarah tadi menjadi paradigma baru yang harus dimiliki oleh siapapun yang bergerak di latar profesi bimbingan dan konseling.

BERCERMIN DARI SEJARAH AMERIKA

Kita harus mengakui bahwa kelahiran dan perkembangan konsep serta paradigma layanan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak lain merupakan replikasi dan adopsi model yang telah berkembang sejak lama di Amerika Serikat (*atau lebih tepatnya made in America?*). Pemahaman tentang bimbingan dan konseling (selanjutnya baca; BK) sebagai suatu sistem dan kerangka kerja kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari pandangan umum bahwa layanan BK merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Di Amerika Serikat, latar kelahiran BK di awal abad 20 bermula dari keprihatinan yang mendalam dari kalangan dunia pendidikan terhadap carut-marutnya perkembangan

kepribadian generasi muda terutama kalangan pelajar di sekolah yang terkena dampak gelombang besar industrialisasi di kota-kota besar; jumlah siswa drop-out meningkat (kaum muda lebih memilih bekerja ketimbang sekolah, sementara keterampilan kerja tidak memadai), pergeseran nilai dalam keluarga dan masyarakat, urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota, dan problem-problem sosial yang lain (Gysbers & Henderson, 2006).

Kenyataan tersebut akhirnya memicu tumbuhnya layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu gerakan sosial yang selaras dengan gerakan kemajuan (*progressive movement*) yang berkembang dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat pada saat itu yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pendidikan saat itu, seperti Frank Parsons, Charles Merrill, Meyer Blommfield, Jesse B. Davis, Anna Reed, E. W. Weaver dan David Hill (Gysbers & Henderson, 2006; Gunawan, 2001). Para tokoh tersebut sama-sama memandang secara kritis bahwa gelombang revolusi industri yang membawa dampak negatif bagi perkembangan generasi muda harus dicegah.

Gerakan bimbingan yang muncul di AS dalam bentuk bimbingan pekerjaan (*vocational guidance*) tersebut membawa pengaruh besar terhadap banyak negara lainnya, seperti Filipina, Malaysia, India, dan tidak terkecuali Indonesia.

Gunawan (2001, 22) menjelaskan bahwa pada periode awal kemerdekaan masalah bimbingan pekerjaan baru diperhatikan oleh jawatan yang mengurus masalah tenaga kerja. Kegiatan bimbingan kemudian dikembangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan mengembangkan banyak kursus keterampilan bagi kaum muda. Baru pada tahun 1962, ada kebijakan SMA Gaya Baru yang mulai menggeser bimbingan pekerjaan ke arah bimbingan akademik. Secara formal, pemberlakuan kurikulum 1975 mengandung penegasan bahwa BK (saat itu disebut bimbingan dan penyuluhan) merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah. Lahirnya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) tahun 1975 di Malang, Jawa Timur dan pergantian nama IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) tahun 2001 dengan kelengkapan divisi-divisi layanan di dalamnya semakin memperkokoh layanan BK dengan berbagai domain layanan yang semakin kompleks; pribadi, sosial, akademik, karir dan layanan pendukung lainnya.

Sementara itu, inisiatif pengembangan model BKK tidak lepas dari pengaruh gelombang reformasi sekolah (*school reform movement*) yang terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1980-an sampai dengan 1990-an (Brown & Trusty, 2005). Pada tahun 1983, Komisi Nasional Pendidikan di Amerika Serikat saat itu mempublikasikan rekomendasi yang membuat publik tersentak kaget; *A Nation at Risk and The Imperative of Educational Reform* (Negara dalam Bahaya; Pentingnya Reformasi Pendidikan). Beberapa komisioner pendidikan menjelaskan bahwa siswa-siswa di Amerika Serikat telah tertinggal jauh dari siswa-siswa yang ada di Eropa Barat dan negara-negara pasifik lainnya dalam hal prestasi akademik. Fenomena tersebut disebabkan oleh rendahnya standar akademik yang harus dicapai, sebagian besar guru tidak memiliki inspirasi, dan kurikulum yang tidak berkembang optimal (Brown & Trusty, 2005). Dalam hal moral, sekolah-sekolah menengah di Amerika Serikat berhadapan dengan tingginya kekerasan di kalangan pelajar, kenaikan rata-rata kehamilan siswa di luar nikah, dan sebagainya. Inilah kenyataan yang terjadi di negeri yang dianggap sebagai kampiun

dalam demokrasi dan pendidikan. Di tengah kecaman dunia internasional, terpilihnya George W. Bush pada tahun 2000 setidaknya-tidaknya memberi angin segar bagi masa depan reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Di masa Bush, kongres AS telah mengamandemen Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah (*Elementary and Secondary Act*) dan melahirkan UU yang berpihak pada anak (*No Child Left Behind Act*).

Sampai dengan diterbitkannya UU tersebut, Gysbers mengamati bahwa sebagian besar konselor sekolah di Amerika Serikat lebih banyak disibukkan oleh dan menghabiskan waktu untuk tugas dan kewajiban yang tidak profesional. Penelitian yang dilakukan oleh ASCA (*American School Counselor Association*) menunjukkan bahwa sebagian besar konselor sekolah menghabiskan waktu antara 1 sampai 88% dari keseluruhan waktu bekerja hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak profesional dan tidak ada kaitannya langsung dengan layanan bimbingan dan konseling (Brown & Trusty, 2005). Tugas-tugas yang tidak profesional tersebut menurut ASCA, seperti kegiatan pendaftaran dan mengatur penjadwalan siswa baru (*registering and scheduling*), menangani problem kedisiplinan siswa di sekolah, pengaturan berlebihan dalam hal seragam sekolah, mengerjakan tugas klerikal dan administratif, bahkan sampai dengan menggantikan tugas guru dalam mengajarkan mata pelajaran atau subjek tertentu di luar bidang layanan BK.

Di tengah arus deras reformasi pendidikan, berbagai organisasi profesi bidang layanan BK yang ada di negeri Paman Sam tersebut memandang bahwa reformasi yang terjadi merupakan kesempatan emas untuk mereposisi program bimbingan dan konseling sebagai bagian penting dari misi pendidikan (sekolah) dalam mendukung pencapaian prestasi akademik dan fasilitasi tugas perkembangan siswa di berbagai aspek. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari fenomena yang terjadi di Amerika Serikat tersebut, yaitu paradigma dan implementasi model BKK merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari gelombang reformasi sekolah yang terjadi saat itu.

MENULIS SEJARAH KITA SENDIRI

Lalu, bagaimana dengan sejarah kita sendiri? Tidak sepenuhnya kita dapat membaca dan menganalisis sejarah ke-BK-an yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena profesi bimbingan dan konseling kita sekarang ini belum memasuki fase historis, sebab kita sebagai pelaku sejarah masih mengalami proses untuk membangun visi dan aksi layanan bimbingan dan konseling yang kokoh di masa mendatang.

Walaupun demikian, pada dasarnya warna dan nuansa dunia pendidikan kita (termasuk layanan bimbingan dan konseling) tidak lepas dari momentum, peristiwa penting, dan konstelasi sosial-politik yang telah hadir di Indonesia. Sejarah hanya dapat ditulis berdasarkan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, tidak terkecuali sejarah pendidikan dan perkembangan layanan profesional bimbingan dan konseling. Dewasa ini, kita seolah-olah tengah mereplikasi sejarah Amerika. Selama lebih dari satu dekade, bangsa Indonesia tengah memasuki masa reformasi di berbagai bidang, tidak terkecuali pendidikan. Semangat reformasi dalam bidang pendidikan tersebut ditandai oleh keprihatinan yang mendalam seluruh pihak terhadap rendahnya indeks kualitas pembangunan sumber

daya manusia yang dilansir oleh berbagai media pemeringkatan internasional, angka partisipasi pendidikan yang rendah, beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya bahkan diidentifikasi sebagai “kantong merah” buta aksara, kesenjangan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan di berbagai daerah di tanah air, dan sebagainya.

Allahuyarham, Prof. Dedi Supriadi (Mulyana, 2004) pernah mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka tahun 1945 dan bahkan sejak program-program Repelita dimulai tahun 1969/1970 tatkala pembangunan pendidikan mulai dilaksanakan dengan serius, baru 4-5 tahun terakhir ini (2005-2009) sejak reformasi bergulir tahun 1998 merupakan periode yang paling padat perubahan. Beberapa perubahan yang mendominasi panggung pendidikan selama tahun-tahun tersebut, seperti Pendidikan Berbasis Luas, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, Ujian Akhir Nasional (UAN) yang menggantikan EBTANAS, pembentukan Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Tahun 2003 bisa jadi merupakan salah satu tahun puncak perubahan tersebut dengan lahirnya UU No 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu diikuti dengan UU Guru dan Dosen, dan berbagai perangkat peraturan pemerintah dan menteri yang memberi penjabaran lebih luas tentang berbagai perubahan-perubahan dimaksud.

Belakangan mulai muncul label-label perubahan yang berseliweran tanpa terkendali; manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), peningkatan mutu berbasis sekolah (*school-based quality improvement*), belajar berbasis komputer (*learning-assisted computer*). Sepanjang tahun 2006 dan akhir 2009 ini, energi seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan terkuras habis dalam menghadapi proyek nasional dalam skala besar yang melibatkan berbagai kepentingan; Sertifikasi Guru dalam berbagai varian dan bentuk. Pertanyaan lebih lanjut, apakah perubahan-perubahan itu dapat dianggap sebagai tonggak bersejarah telah terjadi reformasi pendidikan (sekolah)?

Dalam konteks itu semua, peran bimbingan dan konseling semakin eksis dan diakui secara eksplisit dalam arus besar perubahan dimaksud. Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah, yang dulunya lebih dikenal sebagai kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan (BP), dewasa ini semakin penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Tujuan utama layanan BK di sekolah adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Namun demikian, implementasi layanan BK yang ideal tersebut berhadapan dengan berbagai hambatan dan sejumlah kendala serius. Problematika tersebut tampak pada image negatif yang muncul di kalangan siswa dan sejumlah kalangan yang menganggap bahwa BK hanya menangani “anak-anak bermasalah” dan bertugas memberikan skoring pelanggaran atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa. Yang lebih ironis lagi, munculnya pola sikap negatif dan kenakalan siswa pada umumnya seringkali dianggap sebagai dampak dari kurang berfungsinya layanan BK di sekolah. *Masalah-masalah tersebut hampir dapat dikatakan sama persis dengan kondisi bimbingan dan*

konseling yang terjadi di Amerika Serikat sebelum reformasi sekolah dimulai. Sekali lagi penulis ingin tegaskan; kita seolah-olah mereplikasi sejarah Amerika.

Berbagai persoalan tersebut salah satunya disebabkan oleh belum dipahaminya paradigma hubungan kolaborasi antarprofesi dalam satuan pendidikan (sekolah). Unjuk kerja profesi guru di sekolah, termasuk BK belum sepenuhnya mengimplementasikan pola kerja yang bersifat komprehensif yang sangat menekankan pada aspek hubungan kolaboratif dan saling mendukung antarguru yang terlibat. Premis utama yang ingin dikembangkan dalam paradigm layanan komprehensif, yakni: tujuan layanan BK pada dasarnya selaras dan sejalan dengan tujuan pendidikan pada umumnya, layanan BK hanya dapat tercapai optimal bila terjadi kolaborasi profesional antarguru, dan implementasi layanan harus ditopang oleh manajemen dan kepemimpinan sekolah yang kokoh.

Benang merah yang dapat diurai dari gagasan tentang lintasan sejarah, reformasi pendidikan, dan BKK di atas adalah bahwa usaha serius dalam memahami perkembangan bimbingan dan konseling dalam berbagai pendekatan dan bentuknya harus diletakkan dalam koridor sistem pendidikan dan perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalamnya. Eksistensi sekolah sebagai sistem besar dan layanan BK sebagai subsistem bersifat saling melengkapi (komplementaris) satu dengan yang lain. Jika ingin memahami bimbingan dan konseling secara utuh dan komprehensif, maka pahamiilah perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional kita secara menyeluruh pula.

Sleman, 20 November 2009

REFERENSI

- Gunawan, Y. (2001). *Pengantar Bimbingan dan Konseling; Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prehallindo
- Gysbers, N. C. & Henderson, P. (2006). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria: American Counseling Association
- Mulyana, Rohmat. (2004). *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan; In Memoriam Prof. Dedi Supriadi*, Bandung: Penerbit Rosdakarya
- Brown, D. & Trusty, J. (2005). *Designing and Leading Comprehensive School Counseling Programs; Promoting Student Competence and Meeting Student Needs*